

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTUMBUHAN  
PENDUDUK, PERTUMBUHAN INVESTASI, DAN INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN  
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2007-2014**

Del Anggina<sup>1</sup>  
Wahyu Dwi Artaningtyas<sup>2</sup>

***Abstract:** The Influence of Economic Growth, Population Growth, Investment Growth, and Human Development Index on Inequality of Revenue Distribution in Daerah Istimewa Yogyakarta Year 2007-2014. This research is descriptive, the approach used in this research is quantitative approach because the research data in the form of numbers and analysis using statistics. The secondary data used in econometric analysis in this study is panel data in annual form. Time series data is used from 2007-2014. Cross section data includes 5 districts / cities in Yogyakarta Special Region. The results showed economic growth and population growth did not affect the inequality of income distribution in the District / City of Daerah Istimewa Yogyakarta Year 2007-2014. Investment growth has a negative and significant effect on income inequality in the District / City of Daerah Istimewa Yogyakarta Year 2007-2014. Human Development Index (HDI) has a positive and significant effect on income inequality in the District / City of Daerah Istimewa Yogyakarta Year 2007-2014.*

**Abstrak:** Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014. Penelitian ini adalah deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Data sekunder yang digunakan dalam analisis ekonometrika pada penelitian ini adalah data panel dalam bentuk tahunan. Data time series yang digunakan mulai dari periode 2007-2014. Data cross section meliputi 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2014. Pertumbuhan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2014. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2014.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan ekonomi, penduduk, investasi, IPM, ketimpangan.

---

<sup>1</sup> Alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: artaningtyas73@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita merupakan masalah yang berbeda dari masalah pendapatan distribusi pendapatan. Apabila terjadi distribusi pendapatan yang sempurna (*absolute equality*) maka tiap orang akan menerima pendapatan yang sama besar. Angka pendapatan per kapita yang ada selama ini merupakan angka rata-rata yang tidak mencerminkan pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap penduduk. Seberapa yang diterima oleh tiap penduduk sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan tersebut. Oleh karenanya pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan.

Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi (Suryono, 2000). Menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat.

Kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan adalah dua hal yang sedang gencar-gencarnya ditekan pertumbuhannya oleh pemerintah. Ketidakmerataan terkait erat dengan kemiskinan karena secara mendasar adalah indikator kemiskinan relatif, yaitu kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Rendahnya ketidakmerataan, atau semakin meratanya distribusi pendapatan, tentunya merupakan salah satu agenda penting pembangunan ekonomi.

Masalah kesenjangan dalam praktek sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada rakyat. Namun, yang terjadi sebaliknya, kesenjangan terjadi di mana-mana. Misalnya, di daerah yang miskin dan PDRB-nya rendah, para pejabat dan kepala dinas mengendarai mobil mewah dan tinggal di perumahan mewah.

Aspek kesenjangan ekonomi dan indikator ekonomi untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antara lain dengan melihat Indeks Gini (Gini Ratio). Ironisnya indeks Gini tercatat mengalami peningkatan di beberapa kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal, indeks Gini merupakan indikator tingkat distribusi pendapatan yang ditunjukkan dengan koefisien nol hingga satu, yang artinya semakin tinggi koefisien, kian tidak merata distribusi pendapatan penduduk. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa tingkat distribusi pendapatan menunjukkan adanya ketidakmerataan yang hampir mendekati setengah parah di saat perekonomian dikatakan dalam angka terlihat cukup baik.

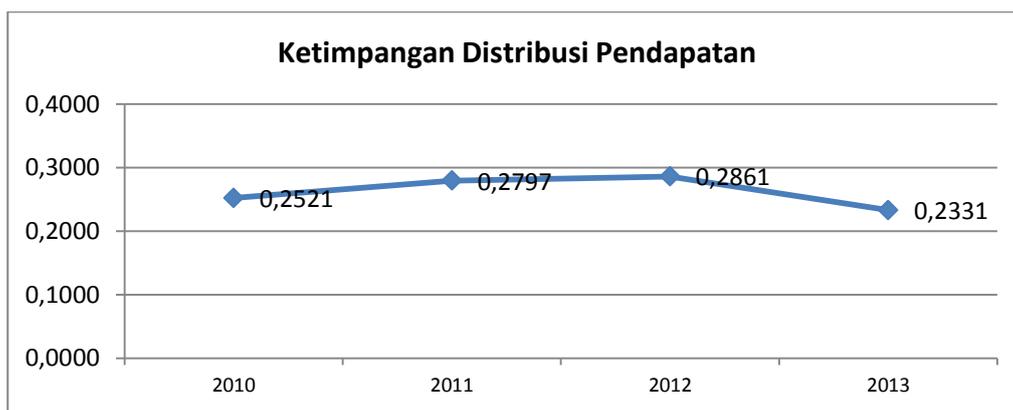
Tabel 1  
Ketimpangan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta  
tahun 2010-2014 (Indeks Gini)

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
1	Kulonprogo	0,2408	0,3365	0,3429	0,2959	0,3040
2	Bantul	0,2746	0,2963	0,3068	0,2371	0,2787
3	Gunung Kidul	0,2517	0,3010	0,3234	0,2447	0,2802
4	Sleman	0,2758	0,2709	0,2783	0,2126	0,2594
5	Kota Yogyakarta	0,2174	0,1937	0,1793	0,1750	0,1914

Sumber : BPS, Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014 dan data diolah

Berdasarkan tabel 1 distribusi pendapatan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan distribusi pendapatan. Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan Indeks Gini pada tahun 2011 sebesar 0,01. Turun kembali pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,04. Kabupaten Bantul mengalami kenaikan Indeks Gini sebesar 0,01 pada tahun 2012, kembali mengalami penurunan Indeks Gini sebesar 0,07. Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,08. Kabupaten Sleman Indeks Gini mengalami penurunan sebesar 0,07 pada tahun 2013. Kabupaten Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami penurunan angka Indeks Gini, namun pada tahun 2012-2013 tidak terjadi perubahan.

Secara keseluruhan trend atau pergerakan dari ketimpangan distribusi pendapatan dari kelima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1  
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di  
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2013

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa trend atau pergerakan dari ketimpangan distribusi pendapatan dari kelima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung berfluktuasi, dimana pada awal tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dan tahun 2013 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan mengalami penurunan atau menunjukkan semakin meratanya distribusi pendapatan pada kelima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketidakmerataan pembangunan antar daerah adalah indikator pemerataan daerah yang melibatkan sejauh mana pemerataan terjadi antar daerah dalam suatu wilayah tertentu sisi ketidakmerataan yang terjadi antar daerah. Pendapatan per kapita dan disparitas merupakan fungsi dari waktu. Pada tahap awal pembangunan, perbedaan laju pertumbuhan ekonomi regional yang cukup besar antara daerah telah mengakibatkan disparitas dalam distribusi pendapatan antar daerah. Namun dalam jangka panjang, ketika faktor-faktor produksi di daerah semakin dioptimalkan dalam pembangunan maka perbedaan laju pertumbuhan output antar daerah akan cenderung menurun. Hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata di setiap daerah seiring dengan waktu yang berjalan (Etharina, 2005:65).

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan dinegara sedang berkembang, antara lain adalah ketidakmerataan pembangunan antar daerah, penambahan penduduk, dan nvestasi yang banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*) sehingga prosentase pendapatan

modal dari harta tambahan besar dibanding dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah (Arsyad, 1999:226).

Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terlepas dari usaha keras secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Potensi daerah dan kekayaan alam dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain berbagai kendala seperti sumber daya manusia dan modal untuk memanfaatkan potensi tersebut masih dihadapi oleh penentu kebijakan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten/kota. Akibatnya kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota dalam pencapaian tingkat perekonomian.

Dibawah ini tabel data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2010 s.d. 2013.

Tabel 2  
Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta  
ADHK tahun 2000 Tahun 2010-2013 (Persentase)

No	Kabupaten / Kota	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
1	Kulon Progo	3,06	4,95	5,01	5,05	4,52
2	Bantul	4,97	5,27	5,42	5,57	5,31
3	Gunung Kidul	4,15	4,33	4,51	5,16	4,54
4	Sleman	4,49	5,19	5,64	5,7	5,26
5	Yogyakarta	4,98	5,64	5,89	5,64	5,54
6	DIY	4,88	5,17	5,46	5,40	5,23

Sumber : BPS DI Yogyakarta tahun 2010-2013, data diolah.

Berdasarkan tabel 2 pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 4 tahun memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23%. Kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi diatas nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi adalah Yogyakarta yaitu sebesar 5,54%, Bantul yaitu sebesar 5,31%, dan Sleman yaitu sebesar 5,26%. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dibawah nilai rata-rata provinsi adalah Kulon Progo yaitu sebesar 4.52% dan Gunung Kidul yaitu sebesar 4.54%.

Lincoln (2010) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Lincoln juga menambahkan bahwa masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor.

Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan distribusi pendapatan atau kesejahteraan (Todaro, 2000). Lebih lanjut Todaro dalam Suyana Utama (2008) mengatakan, kesenjangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.

Investasi merupakan penanaman modal di suatu perusahaan tertentu. Penanaman modal bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Dengan adanya penambahan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah, dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Sukirno, 2004). Fleisher *et al.* (2007) mengatakan bahwa faktor penentu kesenjangan antar wilayah meliputi investasi modal fisik, modal manusia, dan modal infrastruktur.

Faktor berikutnya yang diduga mempengaruhi tingginya ketimpangan distribusi pendapatan adalah kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM-nya lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya. Peningkatan IPM pada suatu daerah yang tidak diiringi dengan peningkatan IPM di daerah lainnya akan memicu terjadinya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan (Brata, 2002).

Terdapat tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan pengukuran IPM yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar kehidupan dimana ketiga indikator ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, untuk meningkatkan IPM pemerintah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut disamping itu perlu juga diperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti kesempatan kerja, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3  
Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2013

No	Kabupaten / Kota	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
1	Kulon Progo	74,49	75,04	75,33	70,01	73,72
2	Bantul	74,53	75,05	75,51	75,95	75,26
3	Gunung Kidul	73,45	73,84	71,11	71,64	72,51
4	Sleman	78,20	78,79	79,40	78,01	78,60
5	Yogyakarta	79,52	79,90	80,24	80,51	80,04
6	Rata-rata	76,04	76,52	76,32	75,22	76,03

Sumber : BPS DI Yogyakarta tahun 2010-2013, data diolah

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa Kota Yogyakarta menempati urutan pertama dengan rata-rata IPM sebesar 80,04 dan kemudian Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah yang memiliki rata-rata IPM terendah yaitu sebesar 72,51. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunung Kidul disebabkan oleh tidak adanya perguruan tinggi dan lapangan usaha yang memadai sehingga masyarakat Gunung Kidul lebih memilih keluar dari Gunung Kidul dan tidak kembali ke daerah asalnya, sehingga yang seharusnya Indeks Pembangunan Manusia di Gunung Kidul Tinggi menjadi rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan tabel 3 juga menunjukkan bahwa indeks rata-rata di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta keseluruhan mengalami kenaikan, akan tetapi indeks rata-rata IPM di Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 adalah 70,01 menurun dari tahun sebelumnya 75,33. Penurunan ini juga terjadi pada Kabupaten Gunung Kidul di tahun 2012 dan tahun 2013 yang menurun dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2011. Kenaikan indeks rata-rata IPM di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari

tahun 2010 ke tahun 2013 memiliki makna khusus yang sangat berarti dalam momentum pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari fenomena tersebut menarik untuk diteliti mengenai terjadinya fluktuasi dari ketimpangan distribusi pendapatan dari kelima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pada awal tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan makin tingginya ketimpangan distribusi pendapatan dan baru di tahun 2013 ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan penurunan. Sejalan dengan uraian di atas, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi akan naik turunnya ketimpangan distribusi pendapatan. Pada penelitian ini, akan ditunjukkan ada tidaknya pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi dan IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014?
- b. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014?
- c. Bagaimana pengaruh pertumbuhan investasi terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014?
- d. Bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2007-2014?

Berangkat dari rumusan masalah maka agar penelitian ini lebih terarah maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, IPM, dan ketimpangan distribusi pendapatan.
- b. Data yang digunakan sehubungan dengan variabel penelitian mulai dari tahun 2007-2014.
- c. Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan Penulisan :

- a. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
- b. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
- c. Menganalisis pengaruh pertumbuhan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
- d. Menganalisis pengaruh IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.

Todaro dan Smith menjelaskan bahwa untuk menganalisis ketimpangan dapat diukur dengan menggunakan koefisien Gini yang merupakan sebagai ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga

satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,75, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Semakin besar nilai koefisien Gini, maka mengindikasikan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan, sebaliknya semakin kecil nilai koefisien Gini, mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan.

Menurut Kuznets (dalam Kuncoro, 2006) seorang ekonom Klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (*an inverse U shaped pattern*). Beberapa ekonom pembangunan tetap berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan Kuznets tidak dapat dihindari.

Menurut Syafrizal (dalam Fitriyah dan Rachmawati, 2012) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Kurva Lorenz menjelaskan tingkat ketimpangan dengan menampakkan area timpang yang dibentuk oleh garis lurus dan lengkung pada kurva. Sehingga fluktuasi angka ketimpangan dari waktu ke waktu ataupun perbandingan antar tempat sulit untuk dibedakan. Ukuran secara kuantitatif akan diperjelas dengan perhitungan indeks Gini.

Indeks Gini untuk melihat angka ketimpangan distribusi pendapatan, perhitungan yang sering dipakai adalah Indeks Gini (BPS, 2013). Indeks Gini didapatkan dengan cara menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujursangkar dimana kurva Lorenz tersebut berada (Arsyad, 1999). Secara teknis, langkah awal yaitu penduduk diurutkan dari yang mempunyai pengeluaran perkapita per bulan paling rendah sampai dengan yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan paling tinggi. Kemudian dibuat kelas-kelas setiap 10% dari paling rendah sampai paling tinggi. Langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi persentase dan kumulatif persentase baik untuk penduduk penerima pendapatan maupun pendapatan yang diterima. Nilai dari indeks Gini terletak antara 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna.

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini Ratio pertama kali dikemukakan oleh *C.GINI* pada tahun 1914 yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan (Putra, 2011). Berikut formula untuk mencari indeks Gini:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n \frac{P_i = (Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

G adalah indeks gini,  $P_i$  adalah persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke- $i$ ,  $Q_i$  adalah persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas- $i$ ,  $Q_{i-1}$  adalah persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke- $i$  dan  $n$  adalah banyaknya kelas pendapatan,  $10.000 =$  Bilangan Konstan.

Koefisien gini (*Gini Ratio*) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Agregat Koefisien gini adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol digunakan sebagai ukuran ketidaserataan distribusi pendapatan atau ketidakmerataan distribusi kekayaan. Hal ini ditetapkan sebagai rasio dengan nilai antara 0 dan 1, koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. 0 berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis) dan 1 berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol) (BPS, 2014).

Tabel 4

Indikator Ketimpangan Distribusi Pendapatan	
Nilai Indeks Gini	Tingkat Ketimpangan
< 0,4	Rendah
0,4 – 0,5	Sedang
> 0,5	Tinggi

Sumber : BPS, 2014.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sukirno, 2004).

Albert Otto Hirschman (7 April 1915 - 10 Desember 2012) adalah seorang ekonom yang sangat berpengaruh dan penulis beberapa buku tentang ekonomi politik dan ideologi politik. Kontribusi besar pertamanya adalah di bidang pengembangan ekonomi. Di sini ia menekankan perlunya pertumbuhan tidak seimbang. Salah satu teori dari Albert O Hirschman adalah *"trickle down effect"* (efek ke bawah - kemakmuran). Begitu dahsyatnya kalau teori tersebut bisa terlaksana dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sayang sekali, kegagalan pembangunan ekonomi Orde Baru, yang gembar-gembor pakai pendekatan kemakmuran rakyat, dengan jargon *"trickle down effect"*, tidak terjadi, bahkan menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi, serta kecemburuan sosial (Sukirno, 2004).

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting sebagai berikut (Arsyad 1999:214):

- a. Akumulasi Modal
- b. Pertumbuhan Penduduk
- c. Kemajuan Teknologi

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional (Robinson Tarigan, 2006):

- a. Keuntungan Lokasi
- b. Aglomerasi Migrasi
- c. Aruslulintas modal antar wilayah.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi teori pertumbuhan ekonomi nasional adalah :

- a. Modal
- b. Lapangan Kerja
- c. Kemajuan Tehnologi

Pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas dan migrasi. Apabila angka fertilitas lebih besar daripada angka mortalitas, maka pertumbuhan penduduk menjadi positif. Begitu juga dengan migrasi, apabila nilai migrasi masuk lebih besar daripada nilai migrasi keluar maka pertumbuhan penduduk menjadi positif (Subri, 2003).

Menurut Lincolin (2010) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Lincolin juga menambahkan bahwa masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor.

Menurut Todaro dalam Suyana Utama (2008) mengatakan, kesenjangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang, dan investasi.

Musfidar (2012) dalam penelitiannya di Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa jumlah penduduk yang berumur produktif baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, akan meningkatkan angka ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan proporsi jumlah penduduk yang bekerja masih belum merata di sejumlah daerah, mereka masih banyak yang bekerja di pedesaan dibandingkan di perkotaan, sehingga terjadi perbedaan penghasilan antar mereka yang bekerja di kota dan mereka yang bekerja di desa. Mereka yang bekerja di perkotaan memiliki tingkat penghasilan yang tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di pedesaan.

Investasi menurut Mankiw (2006) adalah komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Ada tiga jenis pengeluaran investasi, yakni sebagai berikut:

- a. Investasi tetap bisnis (*business fixed invesment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi.
- b. Investasi residensial (*residential invesment*) mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan.
- c. Investasi persediaan (*inventory invesment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan digudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi

Menurut Sultan dan Jamzani (2010) Realita di negara berkembang dalam pembangunan terdapat kemajuan yang tidak merata antar daerah atau dengan kata lain terdapat tingkatan ketimpangan antar daerah. Bagaimana yang terjadi di Indonesia, secara geografis wilayah terdiri atas kepulauan menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi ke wilayah pusat pemerintah dan pertumbuhan. Tidak meratanya tingkatan pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah disebabkan oleh:

- a. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.
- b. Alokasi investasi yang tidak merata.
- c. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah.
- d. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) antar wilayah.
- e. Perbedaan kondisi geografis antar wilayah.
- f. Kurang lancarnya perdagangan antar propinsi

Teori Harrod-Domar (dalam Boediono, 1985) adalah perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peranan investasi jangka panjang. Dalam teori Keynes, pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan penawaran agregat. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai pengaruh (lewat proses multiplier) terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang ini, investasi stok kapital misalnya, pabrik-pabrik, jalan-jalan, dan sebagainya.

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi.

Indek Pembangunan Manusia (Todaro dan Smith, 2004) mencoba untuk memeringkat semua negara atau daerah dari skala 0 (IPM terendah) hingga 1 (IPM tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir IPM:

- a. Masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup
- b. Pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata sekolah (satu pertiga)
- c. Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan disparitas daya beli dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas yang semakin menurun dari pendapatan.

Tabel 5.

Nilai Maksimum dan Minimum Perhitungan Komponen IPM		
Indikator Komponen IPM	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
Angka Harapan Hidup	25	85
Angka Melek Huruf	0	100
Rata-rata Lama Sekolah	0	15
<i>Purchasing Power Parity</i>	360.000	737.720

Sumber : BPS, 2007

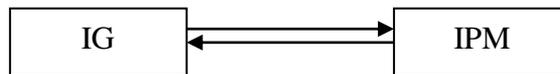
Menurut (mudrajad, 2003) penetapan kategori IPM didasarkan pada skala 0,0-1,0 yang terdiri dari:

- Kategori rendah = nilai IPM 0,-0,5
- Kategori menengah = nilai IPM antara 0,51-0,79
- Kategori tinggi = nilai IPM anantara 0,8-1

Salah satu keuntungan terbesar IPM adalah indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan

bahwa kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif lebih kecil dalam pembangunan manusia (Todaro dan Smith, 2004).

Hubungan antara IPM dan Ketimpangan Pendapatan antar Daerah Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 yang menunjukkan hubungan antara ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini dengan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari nilai IPM (Fitriyah dan Rachmawati, 2012).



Gambar 2  
Keterkaitan IG dan IPM

Keterangan:

IG = Indeks Gini

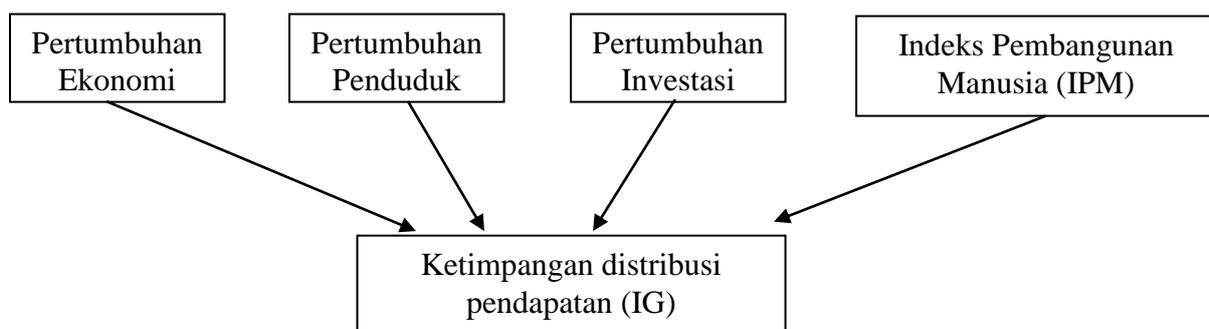
IPM = Indeks Pembangunan Manusia

↔ = Keterkaitan antara ketimpangan pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini untuk mengukur IPM adalah nilai indeks pembangunan manusia dari masing-masing kabupaten di Kabupaten/Kota yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan disajikan dalam satuan persen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2007-2014.

Dan terakhir untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2007-2014 menggunakan Indeks Gini (IG), dengan besaran nilai antara 0-1. Semakin besar IG maka semakin besar kesenjangan, sebaliknya jika IG semakin kecil (mendekati 0) maka semakin merata. Nilai  $IG < 0,4$  berarti disparitas pendapatan yang terjadi tergolong rendah, IG antara  $0,4 - 0,5$  termasuk kategori sedang, kemudian dikatakan tinggi jika  $IG > 0,5$ .

Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi dan alat untuk menguji dan menilai data yang terkumpul berdasarkan pada analisis variabel yang dinyatakan dengan jelas dan menggunakan rumus-rumus yang pasti disempurnakan dengan alat analisis untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan alat analisis panel data atau data panel (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data.



Gambar 3  
Kerangka Pemikiran

Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin sebaiknya benar atau salah. Berdasarkan tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap masalah, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- a. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Diduga pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Diduga pertumbuhan investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Data sekunder yang digunakan dalam analisis ekonometrika pada penelitian ini adalah data panel (gabungan antara data *time series* dan *cross section*) dalam bentuk tahunan. Data *time series* yang digunakan mulai dari periode 2007-2014. Sedangkan data *cross section* meliputi 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan IPM, sedangkan variabel dependen adalah ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, IPM dan ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah : Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014, pertumbuhan penduduk di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014, pertumbuhan investasi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014 dan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder untuk periode tahun 2007-2014. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan adalah :

- a. PDRB atas dasar harga konstan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
- b. PDRB perkapita atas dasar harga konstan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
- c. Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014
- d. Investasi daerah di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
- e. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.

Untuk menguji hipotesis menggunakan alat analisis data panel. Model persamaan yang akan diestimasi berdasarkan teori dan hipotesis bahwa IG dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi dan IPM. Maka model yang digunakan merupakan fungsi matematis yaitu sebagai berikut :

$$IG = f(PE, PP, PINV, IPM)$$

Berdasarkan model regresi linear yang dijabarkan oleh Gujarati (1999: 130) maka penulis mereplikasi model tersebut diatas dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Adapun model regresi yang dipergunakan adalah :

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 PP_{it} + \beta_3 PINV_{it} + \beta_4 IPM_{it} + e_{it} \dots (3.4)$$

Dimana :

<i>IG</i>	= ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota
<i>PE</i>	= pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota
<i>PP</i>	= pertumbuhan penduduk kabupaten/kota
<i>PINV</i>	= pertumbuhan investasi kabupaten/kota
<i>IPM</i>	= indeks pembangunan manusia (rata-rata lama sekolah)
<i>i</i>	= Cross section
<i>t</i>	= Time Series
$\beta$	= koefisien
<i>e</i>	= error term.

Parameter  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ , dan  $\beta_4$  merupakan koefisien dari masing-masing variabel independen dari PE dalam hal ini variabel pertumbuhan ekonomi, PP adalah pertumbuhan penduduk, PINV adalah pertumbuhan investasi dan IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan (IG) menyatakan variabel dependen.

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time series data*) dan kerat lintang (*cross section data*). Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa dunit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$IG = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 PP + \beta_3 PINV + \beta_4 IPM + e_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross-section*. Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah :

$$IG = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 PP + \beta_3 PINV + \beta_4 IPM + e_i ; i = 1, 2, \dots, T$$

Dimana T adalah banyaknya data *time-series*

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 PP + \beta_3 PINV + \beta_4 IPM + e_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Keterangan :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Untuk menguji hipotesis menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data panel. Pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan, yaitu : 1) Estimasi data panel dapat mempertimbangkan heterogenitas dengan memperkenalkan variabel-variabel individu spesifik. 2) data panel dapat memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, kurang kolinearitas antar variabel, dengan derajat bebas yang lebih besar dan lebih efisien. 3) data panel lebih sesuai untuk mempelajari dinamika perubahan. 4) data panel dapat secara lebih baik mendeteksi dan mengukur efek yang tidak dapat diamati dalam data *cross section*

dan *time series*. 5) data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. 6) data panel dapat meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu. Keunggulan-keunggulan tersebut diatas memiliki implikasi pada tidak diperlakukannya pengujian asumsi klasik dalam metode data danel.

Metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu : *Common Effect* (OLS), *Fixed Effect* (efek tetap) atau *Random Effect* (efek random) (Agus Widarjono, 2007). Model efek tetap memungkinkan adanya *intercept* yang tidak konstan untuk tiap-tiap individu. Kelemahan model ini adalah tidak dihasilkannya estimasi umum karena tidak terdapat *general intercept* atau konstanta untuk mewakili seluruh individu. Jika pada model efek tetap perbedaan antar individu dicerminkan oleh *intercept* maka pada model efek random perbedaan tersebut diakomodasikan oleh *error terms* masing-masing individu. Keuntungan model ini adalah menghilangkan heteroskedastisitas apabila terjadi.

Penetapan model yang digunakan berdasarkan Uji Hausman yang mengikuti distribusi  $R^2$ . Nilai Hausman (H) diperoleh dari perbedaan koefisien dan *covarian* antara kedua metode. Statistik uji Hausman mengikuti *chi-square* dan *degree of freedom* sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Jika nilai Hausman lebih besar dari *chi-square* maka model yang tepat adalah *Random Effect* dan sebaliknya apabila nilai Hausman lebih kecil dari *chi-square* maka model yang tepat adalah *Fixed Effect*.

*Common Effect* merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

Penetapan model yang digunakan berdasarkan uji Chow. Pengujian ini untuk menentukan model *common effect* atau model *Fixed Effet* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H<sub>0</sub> : *Common Effect Model* atau pooled OLS

H<sub>1</sub> : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H<sub>0</sub> ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H<sub>0</sub> diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus:

$$F = \frac{\frac{(SSE_1 - SSE_2)}{(n-1)}}{\frac{SSE_2}{(nt - n - k)}}$$

Dimana:

SSE1 : Sum Square Error dari model *Common Effect*

SSE2 : Sum Square Error dari model *Fixed Effect*

n : Jumlah perusahaan (*cross section*)

nt : Jumlah *cross section* x jumlah *time series*

k : Jumlah variabel independen

Sedangkan F tabel didapat dari:

$$F\text{-tabel} = \{ \alpha : df(n-1, nt-n-k) \}$$

Dimana:

$\alpha$  : Tingkat signifikansi yang dipakai (alfa)

n : Jumlah perusahaan (*cross section*)

nt : Jumlah *cross section* x jumlah *time series*

k : Jumlah variabel independen

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Penetapan model yang digunakan berdasarkan uji Chow. Pengujian ini untuk menentukan model model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H0 : *Random Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Uji Hausman akan mengikuti distribusi *chi-squares* sebagai berikut:

$$m = \hat{q} \text{Var}(\hat{q}) - 1\hat{q}$$

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect*, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

Pengujian statistik ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda merupakan model yang tepat untuk menggambarkan hubungan antar variabel dependen (Y) dengan variabel-variabel independen (X). Adapun uji statistiknya yaitu Uji statistik t, Uji statistik F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Menurut Gujarati (2003) Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen, untuk menguji pengaruh variabel independen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

a. Membuat hipotesis :

Hipotesis 1:

H0:  $\beta_i = 0$ , diduga tidak ada pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

H1:  $\beta_i < 0$ , diduga ada pengaruh negatif variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

Hipotesis 2:

H0:  $\beta_i = 0$ , diduga tidak ada pengaruh variabel pertumbuhan penduduk terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

H1:  $\beta_i < 0$ , diduga ada pengaruh positif variabel pertumbuhan penduduk terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

Hipotesis 3:

H0:  $\beta_i = 0$ , diduga tidak ada pengaruh variabel pertumbuhan investasi terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

H1:  $\beta_i < 0$ , diduga ada pengaruh negatif variabel pertumbuhan investasi terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

Hipotesis 4:

H0:  $\beta_i = 0$ , diduga tidak ada pengaruh variabel IPM terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

H1:  $\beta_i < 0$ , diduga ada pengaruh negatif variabel IPM terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

b. Menentukan nilai t tabel, yaitu dengan rumus  $df = n - k$  ( $n$ =jumlah observasi,  $k$ =variabel) dan tingkat kepercayaan ( $\alpha$ ) tertentu.

1) Menentukan ini menggunakan uji satu sisi kanan, maka daerah penolakannya berada di sisi kanan kurva yang luasnya  $\alpha$  dan derajat kebebasan (*degre of freedom*) yaitu :  $df = n - k$ , dimana  $n$  adalah jumlah sampel dan  $k$  adalah variabel.

a) Bila  $t_{\text{statistik}} \leq t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh secara positif dan signifikan antara independen terhadap variabel dependen.

b) Bila  $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh secara positif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Menentukan kriteria pengujian pengaruh negatif

Penelitian ini menggunakan uji satu sisi kiri, maka daerah penolakannya berada di sisi kanan kurva yang luasnya  $\alpha$  dan derajat kebebasan (*degre of freedom*) yaitu :  $df = n - k$ , dimana  $n$  adalah jumlah sampel dan  $k$  adalah konstanta.

1) Bila  $-t_{\text{statistika}} > -t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh secara negative dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Bila  $-t_{\text{statistika}} < -t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya ada pengaruh secara negative dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3) Mencari nilai  $t_{\text{statistik}}$  Gujarati, 1999 : 74

$$t - \text{hitung} = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

Keterangan :

$t$  = Nilai  $t_{\text{statistik}}$

$\beta_i$  = Koefisien regresi

$Se \beta_i$  = Srtandard error  $\beta_i$

Uji F adalah uji serempak yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen.

- 1) Bila  $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima, yang artinya variabel independen (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- 2) Bila  $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_1$  diterima, yang artinya variabel independen (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

$R^2$  (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variasi yang ada didalam variabel independen mampu menjelaskan variasi yang terjadi di dalam variabel dependen.  $R^2$  dikenal sebagai koefisien determinasi majemuk (*multiple coefficient of determination*) dan dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*) dari persamaan regresi yaitu mengukur derajat hubungan antara semua variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dari hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat diketahui seberapa besar ketepatan dari analisa regresi linier berganda.  $R^2$  juga menunjukkan besarnya variasi sumbangan seluruh variabel independen dan dependen. Interpretasinya terhadap hasil koefisien determinasi terletak antara  $0 < R^2 < 1$ , adapun nilai  $R^2$  diperoleh dari :

Untuk menghindari salah persepsi dan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis, maka akan diberikan batasan terhadap variabel-variabel berikut ini: Ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah adalah perbedaan pendapatan antar penduduk yang berada dalam wilayah tertentu. Satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat disparitas pendapatan adalah angka Indeks Gini Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (selanjutnya disebut Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju perubahan nilai PDRB riil pada tiap tahun yang terjadi di 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Satuan yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase.

Pertumbuhan penduduk merupakan laju jumlah penduduk per tahunnya di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Satuan yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan jumlah penduduk adalah persentase.

Pertumbuhan investasi merupakan laju pertumbuhan investasi permanen yang dilakukan daerah dalam bentuk barang milik daerah, tidak termasuk investasi oleh swasta dalam lingkup administrasi pemerintah daerah. Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunaan pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah dikaitkan dengan pemanfaatan barang milik daerah (tidak terjadi pengalihan kepemilikan) meliputi : sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna serta Aset sebagai Penyertaan Modal Daerah (terjadi pengalihan kepemilikan barang milik daerah). Untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia dari masing-masing kabupaten di Kabupaten/Kota yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan disajikan dalam satuan persen Daerah Istimewa Yogyakarta.

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada analisis ini akan menggambarkan data-data hasil penelitian sehubungan dengan penggunaan variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut hasil deskripsi dari data variabel penelitian.

Tabel 6  
Statistik Deskriptif

	IG	PE	PP	PINV	IPM
Mean	0.441750	4.723500	1.597808	170.5377	76.26000
Maximum	0.490000	5.760000	16.20116	2547.735	83.78000
Minimum	0.260000	3.200000	-0.280974	-95.50138	70.01000

Sumber : data diolah, 2017

Analisis statistik deskriptif pada tabel diatas menunjukkan besarnya nilai rata-rata ketimpangan distribusi pendapatan adalah 0.441750 atau berada di antara 0,4 – 0,5 yang berarti tingkat ketimpangan yang terjadi antara kabupaten dan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014 dalam kategori sedang. Selanjutnya diperoleh besarnya nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 4.723500 yang artinya rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kelima kabupaten dan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 4,7%.

Kemudian besarnya rata-rata pertumbuhan penduduk menunjukkan sebesar 1,59% dengan pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi Kabupaten Sleman yaitu di tahun 2008 sebesar 16,20%.

Pada sektor investasi menunjukkan bahwa rata-rata besarnya pertumbuhan investasi di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 170,53%. Dengan investasi tertinggi adalah sebesar 1.551.559.239.735 yang dicapai oleh Kota Yogyakarta di tahun 2014, dan kemudian investasi terendah adalah sebesar 18.613.089.576 yang dibukukan oleh Kabupaten Gunungkidul di tahun 2007.

Dan pada variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan besarnya nilai rata-rata IPM adalah 76,26 atau berada di antara 51 - 79 yang berarti tingkat pembangunan manusia di kabupaten dan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014 dalam kategori menengah.

Pada pembahasan ini menggunakan Uji *Chow* dengan *Redundant Test* untuk mengetahui teknik mana yang akan dipilih yaitu *Common Effect* (Pengolahan data pada metode OLS biasa mengasumsikan setiap wilayah mempunyai intersep dan slope yang sama sehingga individualitas tiap daerah tidak dapat diketahui) ataukah *Fixed Effect* (Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel yang untuk mengetahui adanya perbedaan intersep). Berikut hasil pengujian dengan metode *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Model regresi ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mengetahui persamaan yang akan digunakan dalam penelitian ini lebih tepat berbentuk *common effect* atau *fixed effect*, terlebih dahulu di lakukan uji *Chow* dengan *Redundant Test*.

Tabel 7  
Uji Chow dengan *Redundant Test*

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: KABUPATEN  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.469793	(4,31)	0.0000
Cross-section Chi-square	31.934665	4	0.0000
F-statistic	8.315046		
Prob(F-statistic)	0.000080		

Sumber : data diolah, 2017.

Berdasarkan hasil pengujian uji *Chow* dengan *Redundant Test* diperoleh nilai F-statistic sebesar 8.315046, selanjutnya besarnya nilai F tabel dengan 2,641. Dikarenakan model pengujian memiliki nilai F-statistik lebih besar dari F tabel, maka model yang tepat untuk pengujian statistik adalah menggunakan *Fixed Effect Model*.

Selanjutnya Untuk mengetahui persamaan yang akan digunakan dalam penelitian ini lebih tepat berbentuk *fixed effect* atau *random effect*, terlebih dahulu di lakukan uji *Hausman test*. Hasil perhitungan yang menggunakan metode *Hausman test* dengan alat bantuan komputer program EVIEWS 8.0, di peroleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8  
Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: KABUPATEN  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.879171	4	0.0000

Sumber : data diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai chi-square hitung sebesar 37.879171 yang lebih besar dari chi-square tabel yaitu sebesar 9,488, maka model yang tepat adalah menggunakan *fixed effect*. Dengan demikian berdasarkan uji Hausman model yang tepat untuk menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta adalah model *fixed effect* daripada model *random effect*.

Berikut hasil regresi data panel menggunakan metode *Fixed Effect* dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 9  
Model *Fixed Effect*

Dependent Variable: IG?

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.115200	0.162745	-0.707859	0.4843
PE?	-0.006214	0.007396	-0.840221	0.4072
PP?	0.000031	0.001565	0.020304	0.9839
PINV?	-0.000023	0.00000014	-3.341389	0.0022
IPM?	0.007741	0.002118	3.654312	0.0009
Fixed Effects (Cross)				
_KULONPROGO--C	-0.037766			
_BANTUL--C	0.035541			
_GUNUNGKIDUL--C	0.016673			
_SLEMAN--C	0.011195			
_YOGYAKARTA--C	-0.025643			

Sumber : data diolah, 2017.

Berdasarkan pengujian Model *Fixed Effect* di atas dapat disusun persamaan regresi menurut masing-masing kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, sehingga ke 5 kabupaten/kota tersebut dalam mengestimasi ketimpangan distribusi pendapatan mempunyai persamaan regresi yang berbeda-beda. Misalnya untuk Kabupaten Kulonprogo, persamaannya adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{IG\_KULONPROGO} &= -0.15297 - 0.00621 * \text{PE} + 0.00003 * \text{PP} - 0.00002 * \text{PINV} + 0.00774 * \text{IPM} \\ \text{IG\_BANTUL} &= -0.07966 - 0.00621 * \text{PE} + 0.00003 * \text{PP} - 0.00002 * \text{PINV} + 0.00774 * \text{IPM} \\ \text{IG\_GUNUNGKIDUL} &= -0.09853 - 0.00621 * \text{PE} + 0.00003 * \text{PP} - 0.00002 * \text{PINV} + 0.00774 * \text{IPM} \\ \text{IG\_SLEMAN} &= -0.01040 - 0.00621 * \text{PE} + 0.00003 * \text{PP} - 0.00002 * \text{PINV} + 0.00774 * \text{IPM} \\ \text{IG\_YOGYAKARTA} &= -0.14084 - 0.00621 * \text{PE} + 0.00003 * \text{PP} - 0.00002 * \text{PINV} + 0.00774 * \text{IPM} \end{aligned}$$

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat ditunjukkan pada tabel Model *Fixed Effect* diatas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan membandingkan nilai  $F_{\text{statistik}}$  dengan nilai  $F_{\text{tabel}}$  (df:  $N-K-1=40-4-1=35$ ) adalah sebesar 2,641, selanjutnya dapat diketahui ada tidaknya pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Tabel 10  
Hasil Uji F

F-statistik	F-tabel
12,91680	2,641

Sumber : data diolah, 2017.

Hasil perhitungan pada model *fixed effect*, diperoleh nilai F statistik 12,91680 yang lebih besar dari nilai F tabel ( $12,91680 > 2,641$ ), maka dapat dinyatakan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji t dapat ditunjukkan pada tabel model *fixed effect* diatas. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan membandingkan nilai  $t_{\text{statistik}}$  dengan nilai  $t_{\text{tabel}}$  (df:  $N-1=40-1=39$ ) adalah sebesar 1,6849, selanjutnya dapat diketahui ada tidaknya pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap atau konstan.

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Hasil perhitungan pada model *fixed effect* yang tertera pada tabel 9 di atas, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.006214 dan memiliki nilai  $t_{\text{statistik}}$  sebesar -0.840221 yang lebih kecil dari nilai  $t_{\text{tabel}}$  ( $0.840221 < 1,6849$ ), maka dapat dinyatakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terbukti.

2. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Hasil perhitungan pada model *fixed effect* yang tertera pada tabel 9 di atas, variabel pertumbuhan penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $3.18E-05$  dan memiliki nilai  $t_{\text{statistik}}$  sebesar 0.020304 yang lebih kecil dari nilai  $t_{\text{tabel}}$  ( $0.020304 < 1,6849$ ), maka dapat dinyatakan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan diduga pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terbukti.

3. Pengaruh pertumbuhan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Hasil perhitungan pada model *fixed effect* yang tertera pada tabel 9 di atas, variabel pertumbuhan investasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $-2.38E-05$  dan memiliki nilai  $t_{\text{statistik}}$  sebesar -3.341389 yang lebih besar dari nilai  $t_{\text{tabel}}$  ( $3.341389 > 1,6849$ ), maka dapat dinyatakan pertumbuhan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan diduga pertumbuhan investasi berpengaruh negatif terhadap

- ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta terbukti.
4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Hasil perhitungan pada model *fixed effect* yang tertera pada tabel 9 di atas, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.007741 dan memiliki nilai  $t_{\text{-statistik}}$  sebesar 3.654312 yang lebih besar dari nilai  $t_{\text{-tabel}}$  ( $3.654312 > 1,6849$ ), maka dapat dinyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terbukti.

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel model *fixed effect* di atas dapat diinterpretasikan mengenai besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya, yaitu sebagai berikut.

Tabel 11  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel	<i>Adjusted R square</i>
Pertumbuhan ekonomi	
Pertumbuhan penduduk	0,709680
Pertumbuhan investasi	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	

Sumber : data diolah, 2017.

Berdasarkan tabel 11 dapat diartikan bahwa variasi dari variabel pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu menjelaskan variasi yang terjadi didalam ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,709680 (70,96%), sedangkan sisanya sebesar 29,04% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dihipotesiskan atau variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa makin tingginya pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong penurunan ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ini dapat dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata diantara kelima wilayah kabupaten/kota, melainkan hanyalah wilayah kabupaten tertentu atau segelintir orang kaya. Maksudnya pertumbuhan ekonomi hanya bermanfaat bagi masyarakat kaya, sehingga perkembangan yang terjadi pada suatu wilayah yang tidak diikuti oleh wilayah lain belum mampu mendorong pemerataan pendapatan.

Selanjutnya pada sektor pertumbuhan penduduk juga tidak memberikan pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini menunjukkan tingginya pertumbuhan penduduk tidak semata-mata menjadikan tingginya ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak adanya pengaruh dari pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikarenakan tidak terjadi inflasi, dan secara proporsional diikuti dengan penambahan produksi barang-barang dan investasi antar wilayah tersebut, dengan demikian pertumbuhan penduduk tidak menyebabkan kesenjangan distribusi pendapatan.

Variabel pertumbuhan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, yang berarti makin tingginya pertumbuhan investasi

pada suatu wilayah mampu menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu wilayah. Dengan tingginya investasi di suatu wilayah akan membuat tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut naik karena adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga ketimpangan yang terjadi makin rendah. Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat kita simpulkan, investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan. Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan antar daerah. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Sukirno, 2004). Fleisher *et al.* (2007) mengatakan bahwa faktor penentu kesenjangan antar wilayah meliputi investasi modal fisik, modal manusia, dan modal infrastruktur.

Dan kemudian untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, yang berarti makin tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sisi lain menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan juga makin tinggi. Hal ini bisa saja terjadi, dikarenakan naiknya indeks pembangunan manusia hanya dinikmati oleh sekelompok atau golongan orang saja atau dari beberapa wilayah yang ada hanya dinikmati oleh sebagian wilayah tersebut. Mereka yang mampu menikmati pendidikan formal yang tinggi masih terbatas pada kalangan yang mampu saja. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan distribusi pendapatan antara si kaya dan miskin semakin besar. Dengan demikian, hasil ini tidak sejalan dengan pendapat Becker (Tarmidzi, 2012) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori *human capital*, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh dari variabel-variabel yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2014. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

- b. Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2014. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
- c. Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2014. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, yang berarti pertumbuhan investasi bertambah akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.
- d. Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, menunjukkan bahwa indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2014. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, yang berarti bahwa naiknya IPM akan menaikkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia haruslah di perhatikan. Dengan membangun sarana prasarana penunjang seperti penciptaan lapangan pekerjaan, program Keluarga Berencana ( KB ), menambah investasi, dan program sekolah gratis (beasiswa ) bagi masyarakat kurang mampu sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.
- b. Sehubungan dengan adanya pengaruh positif dari pertumbuhan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, maka perlunya penambahan tingkat investasi yang diprioritaskan di wilayah yang potensi ekonominya lemah guna mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Disamping itu, investasi atau penanaman modal diharapkan dapat membantu masyarakat miskin atau kurang mampu dalam hal ini hasil dari investasi pemerintah daerah dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik lagi. Infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar perputaran ekonomi dari wilayah miskin ke wilayah kaya begitu sebaliknya, sehingga masyarakat miskin dengan cepat dapat pendapatan yang diharapkan akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Investasi atau penanaman modal juga diharapkan dapat menyerap lebih besar tenaga kerja untuk menanggulangi persoalan ketenagakerjaan khususnyaantisipasi penambahan angkatan kerja dan pengangguran, sehingga produktivitas naik dan ketimpangan menurun.
- c. Pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta agar ketimpangan distribusi pendapatannya dapat dicegah, baik dari segi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, kualitas SDM dengan cara meningkatkan beasiswa bagi masyarakat miskin sehingga pendidikan formal yang tinggi juga bisa dapat di tempuh oleh masyarakat miskin, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai didirikannya kampus-kampus di Kabupaten/Kota di daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memiliki universitas misalnya, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya, sehingga bisa menaikkan IPM

di daerah tersebut yang diharapkan dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, pengalokasian pengeluaran daerah dalam bidang infrastruktur yang tepat serta pemerataan investasi di setiap daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad Salihabrur, (2002). *Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 1996-2000*. Jurnal Ilmiah: Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta.
- Akita, T., R.A. Lukman and Y. Yamada. (1999). *Inequality in the Distribution of Household Expenditures in Indonesia: A Theil Decomposition Analysis*. *The Developing Economies*, 37(2): 197-221.
- Albert O Hirschman, terjemahan Sitohang, Paul, (1970). *Strategi Pembangunan Ekonomi*, PT. Dia Rakjat, Yayasan Dana Buku Indonesia, Djakarta.
- Anonimous BPS (Badan Pusat Statistik) Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2010.
- Ardani, A. (1992). *Analysis of Regional Growth and Disparity: The Impact Analysis Project on Indonesian Development*. Unpublished Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania, US.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin., (1997), *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2007, 2013, 2014, bps.go.id. [Online].
- Barro, R. J (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries, *Journal of Economic Growth*, Vol. 5, No. 1
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Brata, A. G. (2002). Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, hal. 113-122.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Emilia dan Imelia, (2006). *Modul Ekonomi Regional*. Jambi: Universitas Jambi <http://iespfeunja.files.wordpress.com/2008/09/ekonomi-regional.pdf>. Diakses tanggal 5 Oktober 2016.
- Etharina, (2005). Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Enokomi* I(1), hal. 59-74.

- Fields, Gary S., (1990), *Income Distribution and Economic Growth*, dalam Gustav Ranis dan T. Paul Schultz, *The State of Development Economics: Progress and Perspectives*, Basil Blackwell, Oxford.
- Fitriyah L., dan Rachmawati L., (2012), Analisis ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur, *Jurnal ekonomi*, Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ktintang Surabaya.
- Friedman, J and Clyde W, (1979), *Territory and Function, the Evolution of Regional Planning*, Edward Arnold Publisher Ltd.
- Fulgang, S, (2013). *Determinants of Income Inequality : Sub-Saharan Perspective*, Aarhus.
- Glasson, John.(1990). *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sihotang. Jakarta: LPFEUI.
- Gujarati, D. (1999). *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Hayami , Y. dan V.W. Ruttan. (1985), *Agricultural Development* , New York: McGraw-Hill.
- Hendra Esmara, (1975). *Kesenjangan Pendapatan Daerah*. Padang: Universitas Andalas.
- Henny A.K. Pangkiro, Debby Ch.Rotinsulu dan Patrick Wauran, (2015). *Analisis Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan di provinsi Sulawesi utara*. Karya Ilmiah: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Hsiao, C. (1986). *Analysis of Panel Data*. New York: Cambridge University Press.
- Irawan, Drs. (2002). *Ekonomika Pembangunan*. Jogjakarta: BPFE.
- Jhingan, M.L. (2002). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Lemhamnas. 1997. *Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keban, (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, Mudrajad (2006), *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.

- Lulus Prapti, (2006). *Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2000-2004)*. Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Mankiw, Gregory N. (2006). *Principles Of Economics*. Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Alih Bahasa Chriswan Sungkono. Jakarta : Salemba Empat.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
- Murtomo, (1988). *Regional and Rural Development Planning Series*. Yogyakarta: UGM.
- Musfidar, Ma'mun, (2012), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010*. Skripsi. Universitas Hasanudin : Makassar.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. (2004). *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Putra, Linggar, D., (2011), Analisis Pengaruh Ketimpangan distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007. *Skripsi*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Richardson, Harry. (2001). *Dasar-Dasar Ekonomi Regional*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Sjafrizal, Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1996. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suliyanto, (2011). *Ekonomika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. . Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sultan, Jamzani Sodik., (2010), Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor yang mempengaruhi Periode (2000-2004). *Buletin Ekonomi*, 8(1),33-44.
- Sumodiningrat, G., (2007). *Ekonometrika Pengantar* . Yogyakarta: BPFE.
- Supangat. Andi, (2005). *Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Penerbit Pustaka.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Susi Lestari, (2016), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012*, Artikel Ilmiah Mahasiswa, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
- Sutarno, (2003). *Perpustakaan dan Masyarakat*. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- T. Tarmidi, Lepi. (1992). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Tambunan, TH., (2001), *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. (2006). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. (1994). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Utama P. F., (2010). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Di Kabupaten/Kota Yang Tergabung Dalam Kawasan Kedungsepur Tahun 2004-2008, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Vebi Yunita, (2014). *Analisis pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di provinsi Riau*. Karya Ilmiah: Universitas Pekanbaru Riau.
- Warpani, Suwardjoko. (1984). *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung. Penerbit ITB.
- Widarjono A., (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia, FE UII.
- Widya Puspita Ayu, (2008). *Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang Periode 2000-2004*. Karya Tulis Ilmiah: Universtas Negeri Semarang.
- Williamson. J.G., (1965). *Regional Inequality and the Process of National Development: a Description of the Patterns.* Economic Development and Cultural Change. Chicago: University of Chicago Press.